

Strategi Indonesia Mendorong Implementasi Pemberdayaan Perempuan melalui Model Ekonomi Bio-Circular-Green (BCG) Asia-Pacific Economic Cooperation Tahun 2022

Farihah Az Zahra¹
Arin Fithriana²
Bambang Pujiyono³

Abstract

This study aims to analyze Indonesia's strategy in encouraging implementation of women's empowerment through APEC's Bio-Circular-Green (BCG) economic model. Based on the results of the United National Development Program Report 2021 on the Gender Inequality Index, Indonesia occupies the 20th position out of 21 underdeveloped countries which shows a high rate of gender inequality. This increase is an important focus by Indonesia, especially to encourage the implementation of women's empowerment through the BCG economic model. Furthermore, Indonesia also agreed on the implementation of the APEC BCG economic model. The results of this study show the strategies carried out by Indonesia related to encouraging the implementation of women's empowerment through the BCG economic model as follows: capacity building support for women entrepreneurs, support for vulnerable groups such as women with disabilities and women living in remote areas through the Women Friendly Village and Child Care (DRPPA) program. Also, support for actively involving women, especially in household waste management systems that proposed by the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) of the Republic of Indonesia, stipulates the development of a climate change and gender-responsive budget tagging system regulated in the National Strategy for the Acceleration of Gender Mainstreaming (PUG) through Gender-Responsive Planning and Budgeting (PPRG).

Keywords: APEC, Bio-Circular-Green (BCG), Gender Mainstreaming, Indonesia, Women's Empowerment

¹ Prodi Hubungan Internasional, FISSIG, Universitas Budi Luhur. Email: farihahzhr@gmail.com

² Prodi Hubungan Internasional, FISSIG, Universitas Budi Luhur. Email: arin.fithriana@budiluhur.ac.id

³ Prodi Hubungan Internasional, FISSIG, Universitas Budi Luhur.

Pendahuluan

Keterkaitan sektor ekonomi dan lingkungan dalam masa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan ekonomi, lingkungan merupakan sumber utama yang menyediakan bahan baku alam dan energi. Isu lingkungan merupakan topik hangat dan menjadi topik terpenting ketiga dalam hubungan internasional setelah keamanan internasional dan ekonomi dunia (Pujayanti, 2012). Pembahasan mengenai hal ini sering dibahas pada forum internasional. Salah satunya pada Konferensi Tingkat Tinggi seperti APEC yang dikenal akan forum ekonomi untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik guna mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan kemakuran di kawasan Asia-Pacific.

Pada Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2022 yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand mengangkat konsep ekonomi *Bio-Circular-Green* (BCG) sebagai strategi pembangunan pasca-pandemi dengan menyelaraskan tiga pendekatan ekonomi dengan menggunakan teknologi dan pembaruan guna mewujudkan kualitas, meminimalisir pemborosan energi, dan mempromosikan model bisnis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Konsep APEC 2022 tersebut kemudian diselenggarakan dalam forum-forumnya yang mana terkait perempuan dibahas pada Women and the Economy Forum "*Women's Empowerment through BCG Economy*" membahas bagaimana meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus mengupayakan pemulihan ekonomi dengan target perempuan penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta perempuan yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan yang menanggung dampak perubahan iklim (APEC, 2022).

Kajian dengan tema yang sama pernah dibahas sebelumnya, antara lain: Keterlibatan Perempuan dalam Aktivitas Ekonomi Hijau (Studi Kasus di Wates Kota Magelang)" menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam ekonomi hijau penting mempertimbangkan peran perempuan dalam memegang kendali konsumsi rumah tangga (Sukaniati, 2014). Kedua, penelitian yang berjudul "*Empowering Women in Papua Province Indonesia as Part of the Green Economy*" menyoroti bahwa pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan ekonomi hijau di Papua berhasil dilaksanakan yang mana data menunjukkan adanya perubahan positif terkait kontribusi pendapatan perempuan antara Papua dan Jayapura (Ginting, 2022). Terakhir, penelitian yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup" memaparkan bahwa perempuan dapat dikatakan sebagai sumber daya manusia yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan (Nur, 2019).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan bagaimana pentingnya pemberdayaan serta melibatkan perempuan dalam pembangunan lingkungan hidup. Selain itu, APEC sebagai forum kerja sama ekonomi dan sudah mencapai tahap sepakat terkait *work plan* BCG, maka negara anggota termasuk Indonesia diperlukan berpartisipasi dalam hal ini. Adapun penelitian ini akan berfokus pada strategi Indonesia mendorong implementasi pemberdayaan perempuan yang bersifat advokasi *gender* mainstreaming atau pengarusutamaan *gender* melalui model ekonomi BCG. Keseriusan Indonesia sebagai entitas negara juga telah membuat strategi pembangunan dan pemberdayaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 dan 5 arahan prioritas Presiden ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait pemberdayaan perempuan.

Pada realitanya, Indonesia diantara negara-negara anggota APEC lainnya menempati posisi terbelakang yaitu berada pada 20 dari 21 negara anggota mengenai Indeks Ketimpangan *Gender* atau *Gender Inequality Index (GII)* yang yang menjelaskan perhitungan sejauh mana sebuah negara kehilangan pencapaian dalam keberhasilan pembangunan terkait tiga aspek pembangunan manusia yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi yang diakibatkan oleh ketimpangan *gender* (UNDP, 2021). Perhitungan nilai mengenai ketimpangan *gender* atau *GII* yaitu jika semakin mendekati nol, maka semakin rendah ketimpangan *gendemya*, begitupula sebaliknya. Indonesia dengan nilai *GII* 0,444 yang mana mendekati nilai 1 memiliki ketimpangan *gender* yang tinggi berdasarkan UNDP Report 2021. Adanya ketimpangan yang tinggi di Indonesia, tentu saja penting sekali untuk melibatkan dan memberikan pemberdayaan guna mendukung peran aktif dan kontribusi perempuan dalam implementasi Visi APEC Putrajaya 2040 melalui model ekonomi *Bio-Circular-Green (BCG)*.

Kajian ini menggunakan unit eksplanasi model ekonomi *BCG* APEC tahun 2022 dan unit analisis strategi Indonesia dalam mendorong implementasi pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, tingkat analisisnya negara-bangsa. Selain itu kerangka berpikir yang dipakai untuk menganalisis penelitian ini yaitu paradigma neo-realisme dan teori modernisasi dalam pembangunan. Selain itu juga akan memaparkan bagaimana penjelasan dari model ekonomi *BCG*, serta inisiasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk strategi untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui model ekonomi *BCG*.

Pembahasan

Model Ekonomi Bio-Circular-Green APEC Tahun 2022

Kerangka Model Ekonomi *BCG* terintegrasi atas tiga model kebijakan ekonomi yaitu *bio-economy*, *circular economy*, dan *green economy* tiap modelnya memiliki tujuan yang sama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam meminimalisir dampak pada lingkungan. Pertama, *bio* ekonomi dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya hayati terbarukan yang berbahan *bio* dan mengubahnya menjadi produk yang memiliki nilai tambah dengan menggunakan pengembangan teknologi dan inovasi. (Europe Commision, 2022). Model ekonomi selanjutnya yaitucircular economy atau sirkular ekonomi yang mengarahkan pada kegiatan metode 3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle* dalam produksi, peredaran dan konsumsi (Tsinghui University, 2022). Berbeda dengan *green economy* atau ekonomi hijau yang mana guna mengatur proses ekosistem dan dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat dengan melestarikan sumber daya alam melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan (UNEP, 2023).

Model ekonomi *BCG* dalam implementasinya diperlukan kerjasama dari pemerintah, sektor privat, dan akademisi bahwa tiap entitas tersebut memiliki peluang untuk berkontribusi dalam koordinasi kegiatan dan investasi yang bermanfaat dalam kegiatan sehingga dapat mencapai hasil *BCG*. Anggota yang tergabung dalam APEC juga berpendapat untuk melakukan kerja sama yang bersifat multi-stakeholder dan melihat bahwa kerangka ekonomi *BCG* dapat memberikan dorongan dalam melaksanakan kerja sama tersebut. Adapun keberhasilan model ekonomi *BCG* ditentukan atas kemampuan dari tiap negara yang mana menjadi aktor penting dalam mengimplementasikan kesepakatan yang telah diatur. APEC dalam hal ini menjadi wadah terkait kesepakatan model ekonomi *BCG*. Terciptanya kesepakatan ini karena adanya interaksi yang dibangun antar negara anggota APEC dalam forum ekonomi. Adapun kesepakatan ini didasari atas prinsip kerja sama APEC yaitu bersifat *consensus* yang mana segala keputusan di APEC harus disepakati dan bermanfaat bagi anggota negara-negara APEC. Selain itu, adanya *concerted*

unilateralism dalam APEC yaitu pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap negara anggota.

Pembahasan tersebut sesuai dengan pandangan neo-realisme yang digunakan untuk menganalisis Indonesia sebagai negara-bangsa yaitu aktor utama dalam sistem internasional. Dalam konteks kesepakatan, neo-realisme memiliki pandangan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dipengaruhi atas sistem internasional (Universitas Andalas, 2015). Paradigma Neo-Realisme melalui pembahasan ini menunjukkan bahwa interaksi antarnegara dalam sistem internasional memainkan peran penting pada perjanjian-perjanjian internasional. Kemampuan dan kepentingan menjadi motivasi bagi negara terkait keberhasilan atau gagalnya perjanjian antar negara (Nugroho, 2011).

Kerangka Konsep Implementasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Model BCG APEC

Kerangka Kerja APEC yang membahas mengenai kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan dan kepemimpinan perempuan di kawasan APEC dikenal dengan Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE). PPWE juga mempromosikan partisipasi penuh perempuan dan memberikan saran kebijakan serta bentuk praktisnya kepada APEC Forum untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan APEC (APEC, 2022). PPWE pada forum ekonomi perempuan atau Women's Economic Forum APEC 2022 membahas mengenai inisiasi dengan tema "Pemberdayaan Perempuan melalui Ekonomi Bio-Circular-Green (BCG)".

Pada forum tersebut juga menyadari bahwa perempuan asli pribumi merupakan populasi rentan, sebagaimana sama dengan perempuan penyandang disabilitas, perempuan yang tinggal di daerah terpencil ataupun pedesaan yang sering merasakan dampak dari perubahan iklim dan limbah yang tidak dapat didaur ulang. Perempuan dan anak perempuan diharapkan dapat mengembangkan solusi yang efektif dan relevan guna memajukan model ekonomi BCG dan partisipasi serta kepemimpinan perempuan yang setara. Hal tersebut penting untuk membangun lingkungan yang lestari dan upaya yang lebih efektif. Penerapan model ekonomi BCG ini merupakan permulaan yang dapat membantu perempuan dalam memiliki pekerjaan tambahan selama pemulihan pandemi termasuk prospek bisnis yang muncul, pemanfaatan platform online ataupun memasuki ekonomi hijau. Pentingnya keterkaitan kesenjangan digital gender dan memastikan akses yang adil ke internet dalam pelatihan keterampilan digital mendorong perempuan dari berbagai latar belakang memanfaatkan peluang ini. Sehingga perempuan dapat berperan pada ekonomi, yang didukung oleh model ekonomi BCG (APEC, 2022).

Pelaksanaan model ekonomi BCG diperlukannya komitmen ataupun upaya APEC guna mendukung terealisasi inisiasi ini. Hal tersebut diatur dalam Document Outcomes mengenai Tujuan Bangkok untuk Ekonomi BCG seperti APEC akan menyusun target dan alur kerja yang mana berkaitan dengan target realisasi model ekonomi BCG seperti:

1. Mendukung upaya global untuk mengatasi semua tantangan lingkungan secara komprehensif termasuk perubahan iklim, cuaca ekstrem dan bencana alam untuk mencapai keberlanjutan
2. Memajukan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan inklusif serta memastikan kedua hal itu saling mendukung dengan kebijakan lingkungan
3. Mempromosikan konservasi lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta menghentikan dan mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati

4. Meningkatkan efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah berkelanjutan menuju nol limbah

Hal tersebut ditujukan dan diperlukan penerapan pendekatan yang inklusif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat dan memajukan kesetaraan gender serta inklusi ekonomi dan pemberdayaan UMKM, perempuan dan lainnya. Selain itu, masih terdapat kelompok perempuan yang belum terlibat dalam kesempatan ini, seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas dan mereka yang berasal dari daerah terpencil.

Agenda di atas kemudian diintegrasikan pada forum dan sub-forum APEC yang mana mengenai perempuan dibahas dalam Women and the Economy Forum. Terkait hal ini, APEC melalui Senior Officials akan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai kemajuan agenda-agenda tersebut di bawah Tujuan Bangkok untuk Ekonomi BCG. Pemantauan dan evaluasi disini adalah sebagai bentuk pengawasan dan memberikan penilaian jangka panjang terhadap pelaksanaan program, inisiatif dan kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara anggota APEC. Selain itu juga bertujuan agar agenda yang telah ditetapkan pada KTT APEC dapat dicapai dengan efektif dan efisien yang mana prosesnya meliputi:

1. Perencanaan Kerja/Agenda/Insiasi: proses merencanakan dan perumusan strategi/langkah untuk mencapai tujuan seperti Tujuan Bangkok untuk Ekonomi BCG
2. Indikator Evaluasi: indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian inisiasi/proyek, terkait hal ini APEC menggunakan indikator output yaitu hasil yang dicapai dalam jangka pendek dan outcome yaitu hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka menengah/panjang
3. Implementasi Proyek: pelaksanaan inisiasi/proyek dalam praktek yang telah direncanakan dalam perencanaan kerja
4. Hasil Pemantauan: temuan berupa informasi maupun data yang diperoleh dari proses pemantauan inisiasi/proyek
5. Evaluasi Kegiatan: proses sistematis untuk menilai sejauh mana inisiasi/proyek APEC telah mencapai tujuan yang ditetapkan

Tahapan proses pemantauan dan evaluasi merupakan hal penting dikarenakan APEC berupaya agar tujuan-tujuan strateginya dapat tercapai (APEC, 2022). Berkaitan dengan BCG, APEC juga mengeluarkan BCG Award sebagai bentuk apresiasi untuk individu dan/atau organisasi terkemuka yang telah menerapkan pendekatan ekonomi BCG ini guna menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat luas untuk ikut serta menerapkan ekonomi BCG. Adapun kategori penghargaan dibagi atas perempuan, pemuda dan UMKM yang diundang atau dinominasikan oleh negara anggota ekonomi dengan masing-masing satu kandidat tiap kategorinya. Penghargaan ini akan diumumkan pada KTT APEC di Amerika Serikat yaitu 6 Agustus 2023 (APEC, 2023).

Tabel 1. Kategori Penghargaan BCG Negara Anggota APEC

Wanita	Anak muda	UMKM
Bisnis milik wanita: menjalankan kepemilikan minimal 50 persen dari total modal <u>atau</u> hak suara minimal 50 persen dari badan hukum	Usia: tidak lebih dari 30 tahun (per 31 Desember 2023)	Jumlah Karyawan: Tidak lebih dari 500.
Beroperasi minimal selama satu tahun kalender.		
Menjadi warga negara dan/atau penduduk dan/atau memiliki dan mengoperasikan bisnis dalam ekonomi APEC yang dicalonkan.		
Mewakili model/pendekatan/aktivitas bisnis BCG yang dapat ditiru.		

Sumber: APEC BCG AWARD 2023

Pembahasan mengenai implementasi pemberdayaan perempuan memiliki kaitan penting dengan perkembangan negara, bahwa dengan dilaksanakannya pemberdayaan pada perempuan, maka perempuan mendapatkan mutu pendidikan yang berkualitas pula. Pendidikan disini tidak terbatas hanya secara pengetahuan, akan tetapi dengan keterampilan dan tingkat produktivitas melalui program-program yang dibuat oleh negara. Partisipasi dari peran perempuan akan memberikan hasil atau dampak pada perkembangan sebuah negara yang secara tidak langsung memperkuat kapasitas negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Penjelasan tersebut termasuk dalam pandangan teori modernisasi dalam pembangunan yang digunakan dalam kerangka berpikir pada penelitian ini. Pandangan teori modernisasi dalam pembangunan menjelaskan bahwa faktor sumber daya manusia dan nilai-nilai akan budaya menjadi hal yang mempengaruhi dari perkembangan negara tersebut. Pendapat Daniel Lerner mengenai teori modernisasi menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada modernisasi ketika adanya perubahan yang bersifat linear atau satu arah dari tradisi menjadi partisipan (Yamin, 2017). Teori Modernisasi pembangunan menjelaskan bahwa mutu pendidikan menjadi faktor utama dalam mencapai tingginya tingkat pendapatan, yang mana disebutkan semakin tingginya mutu pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya keterampilan dan pengetahuan dan tingkat produktivitasnya (Tri, 2016).

Bentuk Strategi Indonesia Mendorong Implementasi Pemberdayaan Perempuan melalui Model Ekonomi BCG

Pemberdayaan Perempuan dan kesetaraan gender pertama kali masuk dalam Tujuan Pembangunan Nasional yaitu pada tahun 1999 yang mengarahkan pada kondisi kesetaraan hak perempuan dan laki-laki, tanggung jawab dan kesempatan. Sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia terus mendukung berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan di Indonesia seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Arahan Presiden mengenai pemberdayaan perempuan, Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024.

Salah satu isi dalam RPJMN membahas mengenai meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda pada bagian kelima. Adapun sub-bagiannya terdapat pada 5 poin kedua yang membahas mengenai peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang isinya mencakup penguatan kebijakan dan regulasi, percepatan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan anggaran yang responsif gender (PPRG). Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu yang baik dalam berbagai lapisan masyarakat juga termasuk dalam hal ini, peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan jejaring dan koordinasi antara entitas masyarakat dan pemerintah (Bappenas, 2020).

Indonesia menjadi negara anggota yang aktif dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, hal ini ditandai dengan keikutsertaan Indonesia menyetujui komitmen La Serena Roadmap. Selain itu, keaktifan Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada forum APEC Women and the Economy mengenai pemberdayaan perempuan melalui BCG juga mendukung peranan model ekonomi BCG yang diimplementasikan pada lintas sektor, salah satunya mengenai pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Model ekonomi BCG bukan berperan sebagai solusi dari penyelesaian ketimpangan gender di Indonesia. Akan tetapi, mendorong lebih lanjut implementasi pemberdayaan perempuan maupun kesetaraan gender di Indonesia yang sifatnya gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender memastikan sektor Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mendapatkan dukungan yang responsif gender. Selain itu, target KemenPPPA dalam BCG ini mengarah kepada kelompok perempuan yang memiliki UMKM/industri rumahan (entrepreneur) yang terkena dampak perubahan iklim seperti gagal panen, ataupun bencana. Kelompok rentan lainnya disebut seperti perempuan yang menjadi kepala keluarga dan perempuan korban kekerasan (Muhtadi, 2023).

Potensi UMKM Perempuan atau women's entrepreneur berperan penting dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang mana dari 64 juta total UMKM di Indonesia, sebanyak 60% dikelola dan dimiliki oleh perempuan. Sektor yang diisi oleh UMKM Perempuan mayoritas berada pada fashion, kriya dan kuliner. Dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha yang dimiliki oleh UMKM Perempuan diperlukannya kemampuan digitalisasi untuk bersaing di era masa kini. Dapat diketahui bahwa jumlah pengakses internet berdasarkan jenis kelamin perempuan sebesar 47,17 dan 50,32 persen pada tahun 2020 dan 2021 menurut data Badan Pusat Statistik. Adapun peningkatan terus terjadi pada tahun 2022 yang mana sebesar 54,70 persen (BPS, 2022).

Hal tersebut menunjukkan kesadaran yang tinggi oleh perempuan akan pemanfaatan internet khususnya pada masa pandemi yang telah merubah pola kegiatan berbisnis yang biasa dilakukan secara offline, akan tetapi para perempuan diharuskan beradaptasi. Salah satu bentuk dukungan pemanfaatan digital dan bisnis perempuan diadakan oleh Tjufoo selaku brand aggregator dan komunitas perempuan berdaya Stellar Women yang mendapatkan apresiasi dan dukungan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) melalui program Akselerasi Bisnis (AKSI) perempuan yang menyediakan sesi mentoring dan bootcamp bagi para pengusaha perempuan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempelajari hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait strategi bisnis yang baik, serta memberikan peluang dalam membangun koneksi (KumpanWoman, 2022).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai entitas Pemerintah mempunyai peran sebagai Kementerian yang koordinatif. Dalam hal ini, segala bentuk kerja lapangan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku pendorong Dinas Provinsi/Kota untuk pelaksanaan program. Selain itu, pada proses perencanaan dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai proyek lintas kementerian untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Peran Komunitas ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai peranan penting dalam kegiatan secara langsung, KemenPPA selaku Kementerian yang tugas dan fungsinya Koordinatif hanya dapat mendukung dan mengajak partisipasi masyarakat untuk mengikuti program-program pemberdayaan perempuan yang berkaitan dengan kinerja dan target KemenPPA. Oleh karena itu, salah satu program yang dikeluarkan oleh Komunitas Stellar Women mendapatkan dukungan dari KemenPPA dikarenakan sejalan dengan RPJMN 2020 – 2024 dan membantu percepatan pengarusutamaan gender. Berkaitan dengan BCG, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu upaya yang dapat didorong oleh KemenPPA untuk menyelesaikan implementasi pemberdayaan perempuan melalui model ekonomi BCG yang mana ilmu pengetahuan dan teknologi diintegrasikan pada partisipasi perempuan pasca pandemi guna mendukung pemulihan ekonomi.

Bentuk lainnya, aksi konkret yang dilakukan oleh KemenPPA yaitu memberikan dukungan pada kelompok rentan seperti perempuan disabilitas dan perempuan yang tinggal di daerah terpencil melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. DRPPA merupakan desa/kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak yang mengarusutamakan hak-hak perempuan termasuk mempromosikan kewirausahaan perempuan bagi perempuan lokal dan perempuan lokal penyandang disabilitas. Saat ini, sudah terdapat 142 DRPPA yang tersebar di 71 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia (Setkab RI, 2022).

Pemerintah Indonesia berinisiasi dalam memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender melalui model ekonomi BCG dengan dukungan melibatkan perempuan secara aktif khususnya pada sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang diusulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, menetapkan pengembangan sistem penandaan anggaran perubahan iklim dan responsif gender yang diatur dalam Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG), dan melaksanakan sosialisasi ataupun edukasi yang berkaitan dengan sumber energi alternatif, praktik pertanian yang ramah lingkungan, pengembangan infrastruktur yang responsif gender dalam mendukung lebih lanjut terkait akses perempuan terhadap energi terbarukan seperti DRPPA. Berdasarkan penjelasan tersebut Indonesia mengupayakan agar implementasi pemberdayaan perempuan sejalan dengan model ekonomi BCG APEC yang mengintegrasikan peran IPTEK yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus mengupayakan pemulihan ekonomi. Konsep transisi berkeadilan terkait pekerjaan lama ke yang baru diartikan sebagai peran digitalisasi yang mewajibkan perempuan untuk bermigrasi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis membahas bagaimana Indonesia berperan sebagai entitas negara yang merupakan aktor utama dalam sistem internasional. Dalam sudut pandang neo-realisme, penulis mengaitkan peran Indonesia sebagai negara dan juga dalam hal kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya. Pandangan neo-realisme memandang bahwa kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Universitas Andalas, 2015). Berdasarkan penggambaran tersebut, keberhasilan model ekonomi BCG ditentukan atas kemampuan dari tiap negara yang mana menjadi aktor penting dalam mengimplementasikan kesepakatan yang telah diatur.

Bentuk strategi yang dikeluarkan oleh Indonesia dalam mendorong implementasi pemberdayaan perempuan merupakan langkah yang diambil oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Indonesia berkaitan dengan perkembangan negara. Kepentingan nasional disini juga mengacu pada kepentingan utama dan termasuk prioritas nasional suatu negara yang mana mengenai pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dibahas pada RPJMN 2020 – 2024 dan Arahan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, dijelaskan pada teori modernisasi dalam pembangunan bahwa faktor sumber daya manusia dan nilai-nilai akan budaya menjadi hal yang mempengaruhi dari perkembangan negara tersebut (Yamin, 2017). Adanya perubahan yang terjadi pada modernisasi dapat terjadi ketika perubahan yang bersifat linear atau satu arah dari tradisi menjadi partisipan (Tri, 2016).

Kesimpulan

Dari temuan penelitian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Indonesia menunjukkan eksistensinya sebagai negara anggota yang aktif untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Partisipasi Indonesia dalam forum Perempuan APEC yaitu mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui model ekonomi BCG dengan fokus keberlanjutan dan kesetaraan. Indonesia juga telah mengakui pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender sebagai prioritas utama dalam pembangun yang tercemin dalam RPJM 2020 – 2024 serta arahan presiden. Adapun tantangannya adalah mengenai tugas dan fungsi KemenPPPA yang bersifat koordinatif menyulitkan untuk mengimplementasikan inisiasi BCG ini. Hal tersebut, hanya dapat didukung melalui program-program kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga seperti Bappenas, KLHK, Kemenkeu. Selain itu, dukungan lainnya terhadap mitra seperti LSM maupun swasta.

Strategi yang dikeluarkan pemerintah melalui KemenPPPA penting untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui model ekonomi BCG yang membantu partisipasi perempuan dalam sektor kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang responsif gender. Bentuk lainnya berupa dukungan pelatihan digitalisasi dan akselerasi bisnis pengusaha perempuan, serta fokus pada kelompok rentan menjadi upaya konkret pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan. Implementasi pemberdayaan perempuan sejalan dengan model ekonomi BCG APEC yang mana menunjukkan komitmen Indonesia dalam memastikan kesetaraan gender dan memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih inklusif. Peran teknologi maupun digitalisasi menjadi poin utama dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dikarenakan model ekonomi BCG APEC merupakan strategi pasca-pandemi yang berfokus pada transisi keadilan. Komitmen Indonesia dalam kesepakatan pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui model ekonomi BCG ini diharapkan dapat terus berlanjut, sehingga dapat memenuhi komitmennya. Hal tersebut juga akan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Senior Officials APEC untuk melihat perkembangan dari program-program yang terlaksana tiap negara anggota dibawah model ekonomi BCG.

Referensi

- APEC. (2022). APEC PROJECTS Monitoring and Evaluation. https://www.apec.org/docs/default-source/resources/2022/project-monitoring-and-evaluation15c2b54889f44900baf8801209a60a7e.pdf?sfvrsn=1c36fc36_2 diakses pada 2 Agustus 2023
- APEC. (2023, April). "APEC Bio-Circular-Green (BCG) Award 2023" <https://www.apec.org/apec-bio-circular-green-award>

- Tsinghui University Press and Elsevier. (2022). "Circular Economy: Aims and Scope." <https://www.sciencedirect.com/journal/circular-economy> diakses pada 14 Maret 2023
- UN Environment Programme. (2023). "Green Economy." <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy> diakses pada 14 Maret 2023
- UNDP Report. (2021). Rank Gender Inequality Index, https://hdr.undp.org/sites/default/files/2021-22_HDR/HDR21-22_Statistical_Annex_GII_Table.xlsx diakses pada 10 Januari 2023.
- Universitas Andalas. (2015). "Neo-realisme." <http://scholar.unand.ac.id/15085/4/BAB%20I%20WATERMARK.pdf> diakses pada 28 Desember 2022
- Universitas Pasundan. (2016). "Neo-Realisme," <http://repository.unpas.ac.id/59976/3/BAB%202.pdf> diakses pada 28 Desember 2022
- Yamin, Muhammad & Agus Haryanto, (2017), "Teori Pembangunan Internasional," Yogyakarta: Pustaka Ilmu.